



## Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan

Oktavia Widya Kumalasari <sup>1)</sup>, Hamdan Nafiaturo Rosyida <sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur

Octaviawidya01@gmail.com

### Abstrak

Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi dan pembangunan manusia yang sangat hebat. Namun, kesetaraan gender yang ada tidaklah sebanding dengan kehebatan negara tersebut. Rendahnya kesetaraan gender terutama dalam ranah politik menjadikan Korea Selatan menduduki ke-107 dari 156 negara perihal keterwakilan perempuan di parlemen. Hal itu memicu para perempuan termasuk *civil society* seperti Korea Women's Association United (KWAU) untuk berani bergerak demi memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KWAU untuk mencapai tujuannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan *document research* ditinjau dengan konsep *civil society* dan pemberdayaan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan KWAU sesuai dengan peran yang dimilikinya. Upaya tersebut seperti terjun langsung ke parlemen, melakukan lobby politik, terlibat langsung dalam perancangan undang-undang, mengajukan kebijakan, mengawasi kebijakan, mengawasi partai politik serta mengawasi para pemegang kekuasaan. Selain itu, upaya KWAU juga dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat seperti penyediaan ruang publik atau wadah untuk menyuarakan aspirasi dan pengadaan event yang melibatkan masyarakat luas. Setelah mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KWAU, penelitian kedepannya kiranya dapat lebih jauh melihat efektivitas dari upaya yang telah dilakukan oleh KWAU tersebut.

**Kata kunci:** Gender, Korea Selatan, KWAU, Peran, Perempuan, Upaya

### Abstract

South Korea is a country with great economic and human development. However, the existing gender equality is not commensurate with the greatness of the country. The low level of gender equality, especially in the political sphere, makes South Korea occupy 107th out of 156 countries regarding women's representation in parliament. This has triggered women, including civil society, such as the Korea Women's Association United (KWAU) to dare to move to fight for gender equality in South Korean politics. So the purpose of this study is to find out what efforts KWAU has made to achieve its goals using qualitative research methods and document research in terms of the concept of civil society and women's empowerment. The results of this research indicate that there are several efforts made by KWAU following its role. These efforts include going directly to parliament, conducting political lobbying, being directly involved in drafting laws, proposing policies, supervising policies, supervising political parties, and supervising power holders. In addition, KWAU's efforts are also carried out through approaches with the community such as providing public space or a forum to voice aspirations and organizing events that involve the wider community. After knowing the various efforts that have been made by KWAU, future research would be able to further see the effectiveness of the efforts that have been made by KWAU.

**Key words:** Efforts, Gender, KWAU, South Korea, Women



## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan hal yang sangat diperjuangkan oleh setiap negara di dunia. Hal tersebut karena kesetaraan gender bukan sebatas hak asasi manusia yang bersifat fundamental, melainkan juga landasan yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang sejahtera, damai, dan berkelanjutan (Nations, 2021). Namun, pada kenyataannya secara global, ketidaksetaraan gender masih sangat terlihat jelas dimana perempuan memiliki kesempatan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi maupun pengambilan keputusan (Corps, 2021). Dalam ranah politik, hingga saat ini keterlibatan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia hanya mencapai 25,58% dan masih jauh dari indikator kesetaraan gender pada umumnya yaitu 30-40% (IDEA, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan sosial yang sangat krusial di berbagai negara di dunia tidak terkecuali Korea Selatan. Kita tahu bahwa Korea Selatan termasuk salah satu negara modern dan maju dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Akan tetapi, dibalik itu semua Korea Selatan menyandang predikat salah satu negara dengan kesenjangan gender yang tinggi. Dilansir dari data *World Economic Forum's*, pada tahun 2021 Korea Selatan menduduki peringkat ke 102 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender (Weforum, 2021). Pada pemilihan Majelis Nasional<sup>1</sup> ke-20 di tahun 2016, perempuan Korea Selatan hanya berhasil menduduki kursi parlemen sebanyak 17% dari total kursi keseluruhan (Ipu Parline, 2019). Sedangkan berdasarkan data dari UN Women pada pemilihan Majelis Nasional ke-21 perempuan di Korea Selatan hanya menduduki 19% kursi di parlemen dari total 300 kursi diparlemen (UN Women, 2020).

Tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik tersebut sudah terlihat sejak berpuluh-puluh tahun lalu sebelum demokratisasi Korea Selatan terjadi, dimana perempuan hanya menduduki 0,5-2,5% kursi di parlemen (Hermanns, 2006). Hingga pada tahun 1980-an ketika masa-masa perjuangan demokratisasi Korea Selatan berlangsung dengan banyaknya aksi demonstran yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan pada akhirnya memicu para perempuan untuk ikut turut serta menyuarkan hak-hak perempuan dan menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang terutama dalam ranah politik melalui berbagai cara seperti demonstrasi di ruang publik serta membentuk berbagai organisasi dan gerakan wanita di Korea Selatan.

Salah satu organisasi wanita yang terbentuk saat itu ialah *Korea Women's Assosiation United* (KWAU). KWAU dibentuk pada tanggal 18 Februari 1987 dan berafiliasi dengan 7 cabang serta memayungi 30 *women's organization* yang tersebar di berbagai kota di Korea Selatan. Tujuan dari dibentuknya KWAU ialah untuk turut memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan (KWAU, 2021). Pada awal terbentuknya KWAU, banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap KWAU, salah satunya ialah KWAU dinilai kurang berhasil dalam menyatukan para aktivis feminisme di Korea Selatan sehingga basis keanggotaan KWAU masih dinilai cukup sempit (Moon, 2002). Selain itu, pada awal mula berdirinya KWAU juga masih sering dipandang sebagai organisasi yang lebih memprioritaskan transisi demokrasi daripada memperjuangkan kesetaraan gender sesuai namanya.

Namun hingga kini KWAU berhasil menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting dalam membangun kerangka dasar berbagai kebijakan pemerintah Korea Selatan terutama tentang perempuan yang mana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pencapaian yang telah diperoleh KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan beberapa diantaranya ialah berhasil memelopori pembentukan kementerian kesetaraan gender pertama di Korea Selatan, mengesahkan berbagai Undang-Undang tentang perempuan dan kekerasan seksual, serta berhasil meningkatkan proporsi perempuan di Majelis Nasional sebanyak 17% yaitu dari 2,9% saat KWAU pertama kali dibentuk pada tahun

<sup>1</sup> Majelis Nasional merupakan satu-satunya badan legislatif di Korea Selatan yang terdiri dari 300 kursi dan pemilihannya diadakan setiap 4 tahun sekali. Dalam parlemen ini terdiri dari 9 partai, namun secara tidak langsung yang berkuasa hanya ada 2 partai besar yaitu Partai Besar Nasional dan Partai Demokras Baru Bersatu. Wewenang dari Majelis Nasional adalah untuk merancang, membuat, mensahkan, mengkaji serta merevisi undang-undang atau kebijakan Korea Selatan.



1987 menjadi 19% per Februari 2021 (KWAU, 2021).

Peran penting yang dimiliki oleh KWAU sesuai dengan pernyataan beberapa para ahli seperti Aie-Rie Lee dan HC Lee (2013) yang melihat bahwa *women's movement* atau *women's organization* di Korea Selatan sangat memiliki peran dan pengaruh untuk meningkatkan posisi perempuan di lingkungan sosial masyarakat serta politik Korea Selatan. Kyung Jin Oh (2016) mengenai partisipasi perempuan dan kegiatan yang dilakukan *women's organization* dalam meningkatkan proposi perempuan di ranah politik menunjukkan hasil bahwa *women's movement* memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan memperkuat proporsi perempuan di ranah politik melalui upaya besar yang dilakukan *women's movement* di Korea Selatan dengan menggunakan berbagai strategi salah satunya membangun aliansi antara organisasi perempuan dengan para politisi perempuan. Selain itu Seung-kyung Kim dan Kyounghee Kim (2011) yang juga berpandangan mengenai hubungan antara *women's movement's* dan pemerintah di Korea Selatan menyatakan bahwa *women's movement* di Korea Selatan telah menjalin hubungan yang erat dengan negara maupun lembaga pemerintahan yang mengakibatkan banyaknya organisasi perempuan tumbuh dan aktif di Korea Selatan.

Dengan peran penting dan pencapaian besar yang dimiliki oleh KWAU sehingga dapat tetap berjaya sampai saat ini tidaklah terlepas dari berbagai upaya yang telah KWAU lakukan. Terlebih lagi untuk saat ini, *goals* terdekat yang ingin dicapai oleh KWAU ialah pengesahan Undang-Undang Anti-Diskriminasi di Korea Selatan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan presiden Korea Selatan. Sehingga, berbagai upaya saat ini tengah dilakukan oleh KWAU ditunjang dengan kondisi dimana presiden Korea Selatan saat ini yakni Moon Jae In berkomitmen tegas untuk mendukung kesetaraan gender di Korea Selatan (Choi, 2017). Sehingga hal tersebut semakin memberikan ruang untuk KWAU melakukan berbagai upaya yang telah mereka rencanakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Maka dari itu tujuan utama penelitian ini adalah melihat lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Terkait dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apa saja upaya yang dilakukan KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan ?

## **METODE**

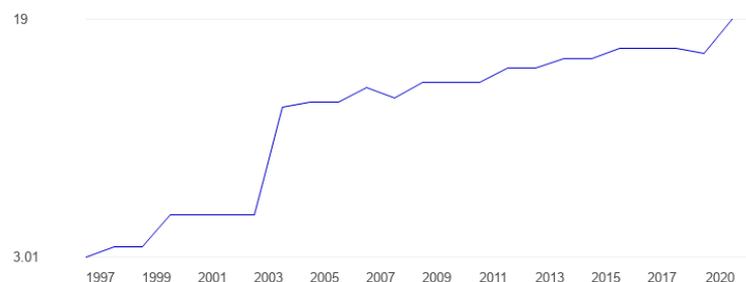
Metode yang digunakan penulis dalam menulis artikel ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mana akan menghasilkan data yang berbentuk lisan maupun tulisan dari suatu fenomena maupun perilaku objek yang sedang diteliti (Suwendra, 2018). Kemudian hasilnya di analisa berdasarkan pendekatan, teori, serta konsep yang digunakan penulis yaitu *Civil Society* dan *Women's Empowerment*. Konsep tersebut dianggap sesuai dengan topik yang dibahas yakni upaya KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan dalam rentang tahun 2016-2021. Selanjutnya, penulis akan menjadikan artikel ini berbentuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif hanya bertujuan untuk menggambarkan mengenai sebuah permasalahan, fakta, peristiwa, ataupun gejala secara meluas, mendalam dan tanpa membuat dugaan (Raco, 2018).

Selama melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi (*document research*), yang mana teknik pengumpulan data tersebut dilakukan melalui studi literatur yang berasal dari buku, situs resmi, jurnal *online*, makalah resmi, majalah terpercaya serta sumber-sumber lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang diharapkan akan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti yakni mengenai upaya yang dilakukan KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Selanjutnya data-data sekunder yang telah didapat dari buku-buku maupun literatur tersebut diolah dan dianalisa (Sawarjuwono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korea Selatan merupakan negara modern dan maju dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat sejak masa pemerintahan Park Chung-hee tahun 1962. Hanya dalam kurun waktu 30 tahun Korea Selatan berhasil bertransformasi dari negara pertanian yang tertinggal menjadi negara industri dengan kekuatan ekonomi yang sangat spektakuler (Darini, 2019). Hingga saat ini per tahun 2021 Korea Selatan berhasil menduduki peringkat ke-10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia (IMF, 2021). Tidak hanya dalam hal perekonomian, Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang menempati peringkat atas dalam hal *Human Development* (UNDP, 2020). Namun pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa tersebut pada nyatanya tidaklah sebanding dengan tingkat kesetaraan gender yang ada. Hal itu karena kesetaraan gender menjadi permasalahan yang sangat serius di Korea Selatan terutama dalam hal keterlibatan perempuan di ranah politik Korea Selatan. Dengan kata lain, pemberdayaan dan proporsi perempuan di arena politik Korea Selatan sangatlah minim dibandingkan dengan laki-laki sehingga perempuan cenderung lebih dirugikan karena rendahnya kesempatan untuk dapat terlibat langsung di pemerintahan termasuk badan legislatif, partai politik, lembaga pemerintahan serta dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut dibuktikan dari rendahnya jumlah perempuan yang berhasil menduduki parlemen Korea Selatan disetiap pemilihan umum majelis nasional Korea Selatan, dimana pada era demokratisasi tahun 1985 hingga 1988 perempuan di Korea Selatan hanya dapat menduduki 2,9% kursi di parlemen dari total 276 kursi. Jumlah tersebut menurun pasca demokratisasi Korea Selatan dimana pada tahun 1988-1982 perempuan hanya menduduki 2% dari 299 kursi di parlemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa parlemen Korea Selatan jauh lebih di dominasi oleh laki-laki dengan rata-rata laki-laki menduduki 97,5% kursi di parlemen Korea Selatan pada saat itu.

**Grafik 1.**  
Perempuan di Kursi Parlemen Korea Selatan (Persentase)



**Sumber :** Inter-Parliamentary Union (2020)

Meskipun pada tahun-tahun berikutnya keterlibatan perempuan di parlemen meningkat, namun hal itu tidaklah berhasil membuat proporsi perempuan di parlemen Korea Selatan seimbang dengan laki-laki. Pada tahun 1992 hingga 1996 keterlibatan perempuan di parlemen Korea Selatan hanya meningkat sebesar 0,3% dalam artian hanya bertambah 1 orang dari jumlah perempuan di parlemen periode sebelumnya. Pada tahun 1996 hingga 2000 perempuan hanya berhasil menduduki 3,6% kursi di parlemen dari total 299 kursi. Selanjutnya pada tahun 2000 sistem kuota mulai diberlakukan yang mana hal itu mewajibkan para partai memberikan 30% kuota kandidat calon legislatif melalui pemilihan langsung dan 50% melalui pemilihan proporsional kepada para perempuan. Sistem kuota tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan proporsi perempuan di parlemen namun hasilnya tidaklah signifikan karena pada nyatanya partai politik di Korea Selatan tidak pernah sepenuhnya menerapkan sistem kuota untuk perempuan dalam artian hanya beberapa persen dari kuota yang benar-benar dialokasikan untuk perempuan dalam Majelis Nasional dan hanya sedikit yang terpilih (Syafputri, 2017). Tidak efektifnya sistem kuota yang diterapkan tersebut dapat terlihat dalam hasil pemilihan pada tahun 2000 dimana perempuan hanya menduduki 5,9% kursi di parlemen dari total 273 kursi dan pada pemilihan umum majelis nasional 2004 perempuan Korea Selatan berhasil menduduki 13% kursi di parlemen. Pada periode selanjutnya di tahun 2008 hingga 2012 perempuan Korea Selatan hanya berhasil meningkatkan proporsi perempuan di



parlemen sebesar 0,7% menjadi 13,7% dari total 299 kursi sedangkan laki-laki menduduki 86,3% kursi parlemen (IFES, 2008).

Pada pemilihan tahun 2012, pencapaian terbesar perempuan di ranah politik terjadi dimana Park Geun-hye berhasil terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Korea Selatan. Pencapaian di sisi eksekutif tersebut menjadi hal penting dalam kemajuan kualitas politik Korea Selatan. Namun, meskipun begitu hal tersebut nampaknya tidaklah seimbang dengan sisi legislatif karena hingga pada pemilihan umum majelis nasional terakhir yang diadakan pada masa pandemi Covid-19 di bulan April 2020, proporsi perempuan di parlemen masihlah sangat kecil dimana perempuan hanya berhasil menduduki sebanyak 19% kursi di parlemen Korea Selatan dari total 300 kursi. Angka tersebut memang merupakan jumlah tertinggi sejak demokratisasi korea tahun 1987, namun jumlah tersebut masih dibawah rata-rata dunia yaitu sebesar 25,58% (IPU, 2020). Selain itu jumlah persentase perempuan yang duduk di kursi parlemen Korea Selatan hingga saat ini masih jauh dari indikator kesetaraan gender pada umumnya dimana perempuan minimal menduduki kursi parlemen sebesar 30-40% (IDEA, 2021). Masih sangat rendahnya pemberdayaan dan proporsi perempuan di parlemen hingga saat ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di ranah politik Korea Selatan masihlah sangat tinggi. Hal itu menempatkan Korea Selatan pada urutan ke-102 dari 156 negara perihal kesetaraan gender secara keseluruhan di segala bidang dan peringkat ke-107 dari 156 negara perihal keterwakilan perempuan di parlemen (Weforum, 2021).

### **Faktor Rendahnya Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan**

Rendahnya kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan difaktori oleh beberapa hal salah satunya ialah adanya ideologi patriarki yang masih tertanam di tengah masyarakat Korea Selatan. Ideologi tersebut menjadikan terbentuknya tatanan masyarakat dimana laki-laki lebih mendominasi dan superior di segala bidang daripada perempuan sehingga perempuan ditempatkan pada posisi "*sub-ordinate*" dan "*the second sex*" dibawah laki-laki. Dalam dunia kerja perempuan tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminasi dimana gaji yang diberikan jauh lebih sedikit daripada laki-laki, posisi kerja yang tidak pernah di promosikan seperti laki-laki, serta perempuan yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk di keluarkan dari pekerjaan karena stigma yang memandang bahwa akan mengalami kerugian apabila mempekerjakan perempuan karena perempuan memiliki banyak urusan pribadi seperti mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan, mengurus anak, serta menyusui sehingga perempuan dianggap tidak dapat bekerja dengan maksimal di perusahaan (Friscula Atara, 2020).

Sistem patriarki yang tertanam di Korea Selatan saat ini merupakan sebuah realitas dari adanya ajaran konfusianisme yang tumbuh sejak ratusan tahun lalu. Meskipun begitu, beberapa nilai dari ajaran konfusianisme masih mengakar di masyarakat hingga saat ini sehingga ajaran konfusianisme tersebut masih dianggap sangat berpengaruh dalam segala bidang kehidupan, pola perilaku, tatanan masyarakat, serta struktur keluarga masyarakat Korea Selatan (I. H. A. N. Park & Cho, 2015). Dalam ajaran konfusianisme di Korea Selatan, posisi perempuan sering kali dirugikan karena perempuan tidak memiliki hak-hak dasar dan kebebasan atas diri mereka. Perempuan di anggap sebagai bawahan dari laki-laki sehingga perempuan diharuskan untuk selalu menggantungkan hidupnya dan selalu patuh pada laki-laki entah itu ayah, suami, ataupun anak laki-laki mereka (Yi, 2008). Selain itu, dalam ranah politik ajaran konfusianisme sangat menegaskan pada hierarki sehingga terciptanya beberapa kriteria pemimpin negara yang ideal yaitu sosok yang kuat, tegas, berwibawa, memegang teguh kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, terpercaya dan juga cekatan. Konfusianisme memandang bahwa kriteria pemimpin tersebut hanya ada pada laki-laki karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah tanpa memiliki kemampuan apapun seperti yang dimiliki laki-laki (Herlina, 2018). Stigma yang terbentuk dari ajaran konfusianisme itulah yang pada akhirnya menyebabkan para perempuan hingga saat ini masih mengalami kesulitan untuk berpartisipasi langsung dalam politik dan menduduki parlemen. Perempuan juga tidak memiliki kebebasan untuk dapat bergerak dalam pengambilan dan pembuatan keputusan



serta menjadi pemimpin di organisasi-organisasi politik Korea Selatan karena perempuan dianggap tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin seperti laki-laki.

### **Upaya Korea Women's Association United (KWAU) Melalui *Lobby Politic***

Dengan peran yang dimiliki KWAU sebagai *civil society* maka terdapat berbagai upaya yang dilakukan KWAU untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh KWAU ialah melalui *lobby politic*. Dalam hal ini KWAU memainkan beberapa peran penting dalam menjalankan berbagai upayanya.

#### **Sebagai Perwakilan Para Perempuan (*As representative*)**

KWAU *as representative* yang berperan menjadi perwakilan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi para perempuan maka anggota-anggota KWAU selalu berupaya untuk terlibat dalam setiap pemilihan umum di Korea Selatan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aktivis KWAU yang berhasil terpilih menjadi anggota Majelis Nasional serta diangkat ke kantor-kantor pemerintah terutama di bagian yang berkaitan dengan kebijakan perempuan. Perwakilan KWAU tersebut juga terlihat sangat jelas pada mantan wakil direktur KWAU Han Myong-suk yang berhasil menjadi menteri pertama di kementerian wanita Korea Selatan (Moon, 2002). Tujuan para aktivis KWAU terjun langsung di parlemen ialah agar dapat dengan mudah mengawal dan *melobby* pemerintah secara langsung dalam merancang ataupun merevisi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Melalui upaya tersebut maka KWAU dapat lebih mudah untuk menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan.

#### **Sebagai Pembela Kepentingan-Kepentingan Para Perempuan (*As advocate*)**

Selain *as representative*, KWAU juga menjalankan berbagai upayanya untuk menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan melalui peran yang dimilikinya yakni *as advocate* dimana KWAU berperan sebagai pembela kepentingan-kepentingan para perempuan yang mana haknya telah dirampas. Aksi pembelaan tersebut dilakukan melalui penyampaian aspirasi rakyat kepada para pembuat kebijakan agar terciptanya keputusan ataupun kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bersama. Berdasarkan hal itu maka KWAU pada tanggal 29 April 2016 melakukan dialog langsung dengan para legislator perempuan yang telah terpilih dalam Majelis Nasional ke-20 (KWAU, 2016). Dialog tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan dan menegaskan kembali aspirasi para perempuan Korea Selatan agar mereka selalu mengingat bahwa para perempuan di Korea Selatan telah mempercayai mereka sebagai perwakilan di parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, dengan masih sedikitnya para perempuan yang terpilih menjadi anggota di parlemen maka dalam dialog tersebut para aktivis KWAU juga berupaya melakukan *lobby* kepada para legislator perempuan agar kedepannya mereka bersedia mengupayakan perubahan pada sistem pemilihan Korea Selatan agar terwujudnya Majelis Nasional yang adil dan setara gender tanpa adanya dominasi oleh laki-laki.

Pada tanggal 9 Juni 2017 KWAU yang berperan *as advocate* juga melakukan kunjungan langsung ke salah satu partai politik Korea Selatan yaitu partai rakyat dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi para perempuan perihal pencalonan Kang Kyung-wha sebagai menteri luar negeri Korea Selatan. Pada pertemuan tersebut KWAU menegaskan bahwa dalam hal diplomasi tidak perlu selalu laki-laki yang mendominasi dalam artian perempuan juga perlu untuk ikut serta dalam kegiatan diplomasi negara (KWAU, 2017a). Dalam pertemuan itu KWAU juga melakukan *lobby* terhadap para anggota parlemen untuk bersedia melantik Kang Kyung-wha sebagai menteri luar negeri perempuan pertama Korea Selatan.

Selain itu, KWAU *as advocate* pada tanggal 5 September 2017 juga melakukan pertemuan langsung dengan ketua komite khusus untuk mendesak komite perihal revisi sistem pemilihan dewan lokal dan parlemen Korea Selatan. Sesuai perannya *as advocate* yang bertugas membela hak-hak perempuan melalui penyampaian aspirasi rakyat kepada para petinggi agar terciptanya keputusan yang sesuai dengan kepentingan umum, maka pada pertemuan tersebut yang paling utama dilakukan KWAU ialah menyampaikan desakan para perempuan untuk melakukan penguatan perihal penerapan sistem kuota untuk perempuan di parlemen dan mempermudah para perempuan untuk mendirikan partai politik. KWAU juga mendesak penghapusan hak istimewa yang dimiliki Majelis Nasional, memperbanyak jumlah



anggota perempuan di Majelis Nasional serta mendesak adanya jaminan untuk kebebasan para perempuan dalam berekspresi dan melakukan kegiatan pemuda di ranah politik (KWAU, 2017).

Upaya lain yang dilakukan KWAU *as advocate* dapat dilihat pada pertemuan yang dilakukan KWAU dengan 50 anggota parlemen di markas besar Majelis Nasional pada tanggal 16 Juli 2019. Dalam pertemuan tersebut KWAU menyampaikan tuntutan untuk memperluas keterwakilan perempuan di parlemen serta menuntut untuk mewajibkan diberlakukannya sistem kuota 30% atau lebih di setiap daerah yang akan melaksanakan pemilu (KWAU, 2019b). Hal itu disampaikan KWAU kepada para anggota parlemen sebagai sebuah strategi dalam menghadapi pemilihan parlemen ke-21 agar lebih banyak lagi perempuan yang dapat menduduki kursi parlemen Korea Selatan.

Sebagai *advocate* KWAU juga melakukan *political talk* bersama dengan para anggota parlemen pada tanggal 29 November 2019 di gedung Majelis Nasional Korea Selatan. Pada agenda tersebut, KWAU menyampaikan langsung beberapa aspirasi para perempuan Korea Selatan kepada para anggota parlemen dengan tujuan membela hak-hak perempuan. Beberapa diantara aspirasi yang disampaikan tersebut yaitu perlu adanya partai feminis di Korea Selatan agar perempuan dapat lebih mudah masuk kedalam partai politik dan menduduki kursi parlemen di pemilihan yang akan datang. Selain itu KWAU juga menegaskan bahwa perlu adanya reformasi politik untuk Majelis Nasional agar dapat lebih setara dalam hal gender dalam artian terciptanya proporsi kursi parlemen yang sama banyak untuk laki-laki dan perempuan (KWAU, 2019d).

### **Penyedia Norma, Kebijakan, Aturan (*As Defines of Standart*)**

Dalam menjalankan upayanya, maka KWAU juga memainkan peran *as defines of standart*. Dalam hal itu KWAU berperan sebagai penyedia norma, aturan, kebijakan serta undang-undang maka KWAU juga terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan serta undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan gender di Korea Selatan. Selain itu, KWAU juga terlibat dalam mempengaruhi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang atau aturan yang kiranya dapat merugikan masyarakat luas terutama para perempuan (Setiawan, 2018).

Upaya KWAU melalui peran *as defines of standart* tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan, seperti yang dilakukan pada tanggal 17 oktober 2017 dimana KWAU membuat petisi perihal Undang-Undang Hubungan Politik. Isi dari petisi kemudian disusun KWAU menjadi sebuah kebijakan yang dirasa perlu untuk ada didalam Undang-Undang Hubungan Politik. Dengan inti kebijakan yang berisikan perihal perubahan jumlah kursi di pemilihan daerah dan perwakilan proporsional untuk perempuan serta mewajibkan ditetapkannya sistem kuota untuk perempuan disetiap daerah, maka para aktivis KWAU menuntut para anggota parlemen untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Hubungan Politik dengan memasukkan beberapa poin yang telah disusun oleh KWAU.

Selain itu, sejak awal tahun 2021 KWAU melakukan berbagai upaya melalui peran yang dimilikinya *as defines of standart*. Salah satu upaya tersebut dilakukan KWAU dengan ikut serta dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Dalam hal itu, KWAU mengajukan beberapa hal yang selaras dengan hak-hak para perempuan untuk dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Tidak hanya sampai terlibat langsung dalam penyusunan RUU Anti-Diskriminasi, KWAU juga dengan aktif selalu melobby dan mendesak para anggota parlemen untuk segera menyelesaikan dan memberlakukan Undang-Undang Anti-Diskriminasi tersebut.

### **Upaya Korea Women's Association United (KWAU) Melalui Pendekatan Dengan Masyarakat**

Selain *lobby politic*, KWAU juga melakukan beberapa upaya melalui pendekatan dengan masyarakat demi menciptakan masyarakat Korea Selatan yang setara gender tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini KWAU berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama para perempuan perihal hak-hak mereka serta perlahan menghilangkan sistem patriarki yang ada di masyarakat. Selain itu, KWAU juga berusaha memberikan ruang



dan kesempatan kepada publik terutama para perempuan untuk menyerukan aspirasi mereka. Dalam hal ini, KWAU juga memainkan beberapa peran penting dalam menjalankan beberapa upayanya.

### **Penyedia Ruang Publik Untuk Masyarakat Terutama Para Perempuan (*As Citizenship Champion*)**

Melalui pendekatan dengan masyarakat, KWAU menjalankan berbagai upayanya *as citizenship champion* yang berarti KWAU bertugas untuk menyediakan ruang publik untuk masyarakat. Dalam hal ini KWAU membuka ruang kepada siapapun terutama para perempuan Korea Selatan yang ingin menyuarakan aspirasinya. Dalam menjalankan perannya *as citizenship champion*, KWAU tidak jarang mengajak para perempuan Korea Selatan untuk melakukan kampanye-kampanye. KWAU juga membuat petisi sebagai wadah para perempuan untuk menyampaikan aspirasi atau tanggapan mereka terhadap suatu isu. Selain itu, KWAU juga mengadakan debat publik bersama para anggota parlemen agar para perempuan Korea Selatan dapat terhubung langsung dengan para pembuat kebijakan. Upaya-upaya tersebut dapat terlihat dalam beberapa kegiatan KWAU dibawah ini :

Pada tanggal 31 Oktober 2018, KWAU *as citizenship champion* mengadakan festival budaya yang bertemakan "malam politik" didepan Majelis Nasional pukul 19:00 bersama dengan para perempuan Korea Selatan, penyandang cacat dan para pemuda serta 7 partai politik dan anggota parlemen. Dalam festival tersebut diadakan bincang-bincang politik bersama dengan ketua dari masing-masing partai mengenai reformasi sistem pemilihan guna menciptakan politik dan Majelis Nasional yang setara gender. Dalam bincang politik tersebut siapapun bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para ketua partai serta anggota parlemen. Selain itu, untuk memeriahkan acara dalam Festival tersebut juga diiringi dengan berbagai pertunjukan (KWAU, 2018b). Festival budaya yang bertema politik tersebut diadakan oleh KWAU dengan tujuan menyediakan ruang serta kesempatan kepada siapapun termasuk para perempuan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada para pembuat kebijakan.

Selain itu, sebagai penyedia ruang publik untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya maka KWAU juga melakukan upayanya untuk menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan dengan mengajak para perempuan Korea Selatan untuk ikut serta dalam agenda pawai penyeruan reformasi pemilihan umum Korea Selatan yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 8:00. Pawai tersebut dilakukan dengan mengelilingi markas partai-partai politik Korea Selatan. Diadakannya pawai tersebut bertujuan untuk mendesak para partai politik menerapkan sistem kuota perempuan yang telah ditetapkan dalam pemilihan yang akan datang (KWAU, 2019a). Hal itu dilakukan KWAU karena masih banyak partai politik yang nakal dalam artian tidak memasukkan satupun perempuan dalam daftar list calon legislatif seperti halnya yang sering dilakukan oleh partai demokrat Korea Selatan.

*As citizenship champion*, upaya yang dilakukan KWAU sepanjang tahun 2021 juga dengan rutin membuat petisi sebagai wadah untuk para perempuan menyuarakan aspirasinya perihal Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Selain itu, petisi tersebut juga digunakan untuk mendesak para anggota parlemen untuk segera memberlakukan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Petisi tersebut tidak hanya direspon oleh para perempuan biasa, namun juga direspon dengan baik oleh para musisi, penulis, aktor sutradara, serta berbagai kepala yayasan perempuan Korea Selatan. Upaya itu dinilai berhasil dalam mengambil perhatian dan menampung aspirasi perempuan maupun masyarakat luas, terhitung 100.000 lebih responden yang mengisi petisi pemberlakuan Undang-Undang Anti-Diskriminasi tersebut. Tidak hanya melalui petisi, KWAU sepanjang tahun 2021 juga dengan rutin mengajak para perempuan untuk ikut melakukan demonstrasi di berbagai tempat terutama di depan gedung Majelis Nasional untuk menuntut segera diberlakukannya Undang-Undang Anti-Diskriminasi tersebut. Dalam aksi demonstrasi itu diikuti puluhan hingga ratusan perempuan yang membawa puluhan bendera dengan lambang kesetaraan gender.

### **Meningkatkan Solidaritas Para Perempuan (*As Solidarity Supporter*)**



Dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan, KWAU juga melakukan upaya melalui pendekatan dengan masyarakat terutama para perempuan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menjalankan perannya sebagai *solidarity supporter*. Dengan peran tersebut maka KWAU berupaya meningkatkan solidaritas serta persatuan yang ada antar para perempuan agar kesamaan tujuan, visi misi serta cita-cita untuk memperjuangkan kesetaraan gender semakin kuat.

Dalam hal ini KWAU mengadakan forum yang diadakan di Kensington Resort Pulau Jeju pada tanggal 28 hingga 30 agustus 2019 (KWAU, 2019c). Sesuai perannya, maka KWAU mempertemukan para aktivis perempuan dari seluruh negeri dalam acara tersebut untuk membahas perihal strategi kedepannya dalam menyebarkan demokrasi serta kesetaraan gender di tengah masyarakat. Selain itu KWAU dengan seluruh aktivis tersebut juga berdiskusi perihal rencana kedepan yang akan diambil. Forum tersebut diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kekompakan para aktivis dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan terutama dalam ranah politik. Selain itu, untuk meningkatkan solidaritas serta persatuan antar masyarakat terutama para perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan terutama dalam ranah politik, maka KWAU *as solidarity supporter* setiap tanggal 8 Maret mengajak masyarakat terutama para perempuan untuk merayakan hari perempuan internasional dengan melakukan kampanye peringatan hari perempuan internasional ataupun dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang akan diikuti oleh para perempuan. Kegiatan perayaan hari perempuan internasional tersebut diadakan dengan tujuan untuk memperkuat persatuan serta solidaritas para perempuan Korea Selatan agar dapat terus memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan terutama dalam ranah politik.

### **Upaya Korea Women's Association United (KWAU) Melalui Pengawasan**

Selain itu, dalam mencapai cita-cita serta tujuannya, KWAU tidak hanya melakukan berbagai upaya melalui *lobby politic* dan pendekatan dengan masyarakat saja. Namun, KWAU juga melakukan berbagai upaya melalui pengawasan-pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, partai politik, serta para anggota parlemen. Upaya tersebut dilakukan KWAU sesuai peran yang dijalankannya yakni *as watchdog* yang berarti KWAU berperan penting dalam menyertai setiap proses politik sebagai pengawas serta pemantau kebijakan yang dibuat serta mengawasi setiap kekuasaan yang digunakan oleh pemangku kebijakan yang kiranya dapat merugikan publik.

### **Mengawasi Partai Politik, Pemegang Kekuasaan, Serta Kebijakan (As Watchdog)**

Dengan KWAU *as watchdog* maka KWAU melakukan upaya untuk menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan dengan selalu mengawasi setiap partai politik melalui kegiatan evaluasi rutin yang dilakukan KWAU terhadap perbuatan dan aksi partai politik yang telah dilakukan selama proses pemilihan umum. Salah satu agenda evaluasi tersebut diadakan KWAU pada tanggal 8 April 2020 pukul 11:00 (KWAU, 2020c). Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan masih banyaknya partai politik yang nakal seperti yang dilakukan oleh partai demokrat menuju pemilihan Majelis Nasional ke-20 dimana partai demokrat Korea Selatan menciptakan partai baru yang bergerak sesuai dengan keinginan mereka tanpa melalui sistem demokrasi. Selain itu, partai demokrat tersebut juga tidak menerapkan sistem 30% kuota perempuan sebagaimana mestinya. Tidak hanya partai demokrat, hampir semua partai kecuali partai minjoong masih menunjukkan komitmen yang sangat buruk terhadap kuota perempuan selama pemilihan (KWAU, 2020b). Berdasarkan hal itu, KWAU melakukan konferensi pers menyatakan penentangan terhadap perbuatan partai-partai tersebut yang tidak memasukkan 30% perempuan dalam kuota calon legislatifnya.

Tidak hanya sampai disitu, sebagai upaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan maka KWAU melalui peran *as watchdog* juga terus mengawasi tindakan setiap partai politik pasca pemilihan atas janji dan komitmen mereka yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Sesuai perannya tersebut KWAU melakukan pengawasan dengan menganalisis serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan partai politik tersebut setelah terpilih dalam Majelis Nasional. Hasil pengawasan, analisa serta evaluasi



terhadap janji-janji partai politik tersebut disampaikan KWAU dalam konferensi pers tanggal 27 Maret 2020. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa para partai politik memang masih belum sepenuhnya merealisasikan janji mereka perihal kesetaraan gender (KWAU, 2020a).

Selain itu pada pemilihan Majelis Nasional ke-21, KWAU *as watchdog* yang berperan penting mengikuti setiap proses politik juga melakukan pengawasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu upaya dalam menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan KPU selama pemilihan. Hasil dari pengawasan KWAU terhadap KPU tersebut disampaikan KWAU melalui konferensi pers pada tanggal 1 April 2020. Dalam konferensi pers tersebut, KWAU mengutuk KPU karena telah ketahuan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. KPU yang seharusnya memastikan tidak adanya muncul partai yang terselubung tanpa melalui proses demokrasi, namun KPU malah menerima pendaftaran partai satelit yang dibentuk oleh partai demokrat secara diam-diam disertai dengan penggelapan dana subsidi pemilu yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan partai satelit. Dalam hal pengawasan, KWAU juga melakukan upaya untuk menegakkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan dengan mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh parlemen seperti yang dilakukan KWAU dengan mengawasi KUHP Korea Selatan. Dengan pengawasan tersebut tidak jarang KWAU menuntut parlemen untuk melakukan revisi pada beberapa poin dalam KUHP tersebut yang dikira dapat merugikan para perempuan terutama yang berkaitan dengan politik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Korea Selatan merupakan negara maju dengan perekonomian yang tumbuh sangat pesat dan berhasil menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-10 di dunia. Selain itu Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang menempati peringkat atas dalam hal *human development*. Namun, hal tersebut tidaklah sebanding dengan kesetaraan gender yang ada terutama dalam ranah politik. Minim dan sulitnya para perempuan duduk di kursi parlemen menunjukkan Korea Selatan yang masih jauh dari kesetaraan gender. Rendahnya kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan tersebut difaktori oleh dua hal yakni sistem patriarki yang masih terus berjalan hingga saat ini dan beberapa nilai konfusianisme yang masih mengakar di masyarakat.

Berdasarkan hal itu maka KWAU selaku *civil society* di Korea Selatan melakukan berbagai upaya untuk dapat memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Upaya tersebut dilakukan sesuai peran yang ada pada diri KWAU seperti *as representative, as advocate, as defines of standart, as citizenship champion, as solidarity supporter* dan *as watchdog*. Dengan peran tersebut KWAU melakukan berbagai upaya seperti terjun langsung dalam parlemen, melakukan pertemuan langsung dengan anggota parlemen, partai politik, ataupun pembuat kebijakan dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi para perempuan. Selain itu KWAU juga membuat kebijakan yang diajukan kepada parlemen serta ikut turut serta merevisi undang-undang. KWAU juga melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyediaan ruang publik untuk mereka menyuarakan aspirasi, membuat *event* yang melibatkan mereka serta mempertemukan para aktivis perempuan. Terakhir KWAU juga mengawasi partai politik, para pemegang kekuasaan serta kebijakan yang dibuat.

Setelah mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan, maka saran untuk penelitian kedepannya ialah lebih berfokus pada efektivitas dan hasil dari upaya yang dilakukan KWAU terhadap perkembangan kesetaraan gender di Korea Selatan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam penulisan artikel ini tidaklah terlepas dari dukungan berbagai pihak. Sehingga, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang sudah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak saya yang sudah memberikan support moral, mental, dan material kepada saya untuk menunjang terselesaikannya penulisan artikel ini. Ketiga, saya ucapkan



terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya Sensei Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si yang sudah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada saya hingga artikel ini dapat terselesaikan. Keempat, saya ucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan staf akademik Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan fasilitas serta ilmu kepada penulis hingga bisa menunjang dalam penyelesaian artikel ini. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Alif Firdaus yang selalu bersedia menjadi tempat sambat dan partner diskusi saya ketika saya mengalami kebingungan di tengah penulisan artikel ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya Deva, Ningrum, Puput dan teman-teman PMM 61 Geral, Hafiz, Dika yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Serta pihak-pihak lain yang sangat berpengaruh selama proses penyelesaian artikel ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Choi, J. (2017). Moon Jae-in's Road to Gender Equal Cabinet. Retrieved January 11, 2022, from <https://www.koreaexpose.com/moon-jae-in-road-to-gender-equal-cabinet/>
- Corps, P. (2021). Global Issues: Gender Equality and Women's Empowerment. Retrieved March 13, 2021, from <https://www.peacecorps.gov/educators/resources/global-issues-gender-equality-and-womens-empowerment/>
- Darini, R. (2019). PARK CHUNG-HEE DAN KEAJAIBAN EKONOMI KOREA SELATAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/PARKCHUNGHEE-MOZAIK+2009.pdf>
- Friscula Atara, V. P. (2020). Konstruksi Sosial Budaya dan Ketidakadilan Gender di Korea Selatan. Retrieved January 3, 2022, from <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/konstruksi-sosial-budaya-ketidakadilan-gender-di-korea-selatan.html>
- Herlina, E. (2018). Representasi Ideologi Gender di Korea Selatan dalam Drama Korea "Because This Is My First Life ." *Universitas Andalas*, 3(1), 13–27. Retrieved from <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/pantun/article/view/801>
- Hermanns, H. (2006). Women in South Korean Politics: A Long Road to Equality. *PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.5130/portal.v3i2.134>
- IDEA. (2021). Gender Quotas | International IDEA. Retrieved October 23, 2021, from <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas>
- IFES. (2008). *IFES Election Guide | Elections: South Korea Parl Apr 9, 2008*. Retrieved from <https://www.electionguide.org/elections/id/1498/>
- IMF. (2021, October). World Economic Outlook Database. Retrieved December 29, 2021, from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/>
- IPU, I.-P. U. (2020). Proportion of seats held by women in national parliaments (%) | Data. Retrieved January 3, 2022, from 2020 website: <https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS>
- Ipu Parline. (2019). Women in Parliaments: World Classification. Retrieved November 24, 2021, from <http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm>
- Kim, S., & Kim, K. (2011). Gender Mainstreaming and the institutionalization of the women ' s movement in South Korea. *Women's Studies International Forum*, 34(5), 390–400. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2011.05.004>
- KWAU. (2016, April 29). 공지사항 - [제7차 성평등포럼] 성평등 국회를 위한 20대 여성 국회의원 당선자들과의 대화. Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=23&document\\_srl=6766](http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=23&document_srl=6766)
- KWAU. (2017a, June 9). Politik - [Politik] Kunjungan ke partai politik oleh kelompok perempuan yang menyerukan kesetaraan gender. Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=10&document\\_srl=9656](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=10&document_srl=9656)
- KWAU. (2017b, September 5). Politik - [Aksi Bersama untuk Reformasi Politik] Wawancara dengan Ketua Won Hye-young dari Pansus Reformasi Politik (9/5 (Selasa) 15:30, Ruang



- Utama Gedung Majelis Nasional 446). Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=9&document\\_srl=10197](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=9&document_srl=10197)
- KWAU. (2018a, March 19). Pemberitahuan - [Konferensi Pers] Konferensi pers untuk mengumumkan posisi kelompok pan-wanita pada amandemen konstitusi pemerintah. Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=15&document\\_srl=10874](http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=15&document_srl=10874)
- KWAU. (2018b, December 4). Politik - 31/10 Mengadakan festival budaya "Malam Sangat Politik" untuk menyerukan reformasi sistem pemilu. Retrieved January 8, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&ckattempt=1&page=7&document\\_srl=12467](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&ckattempt=1&page=7&document_srl=12467)
- KWAU. (2019a, February 18). Politik - [Politik] Buka Majelis Nasional - Pawai warga untuk menyerukan reformasi politik dan reformasi institusi kekuasaan. Retrieved January 8, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=6&document\\_srl=13029](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=6&document_srl=13029)
- KWAU. (2019b, July 18). Politik - Menggelar "Pertemuan Strategis Reformasi Politik untuk Majelis Nasional yang Setara dan Perluasan Keterwakilan Perempuan." Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=5&document\\_srl=14407](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=5&document_srl=14407)
- KWAU. (2019c, September 2). Pendidikan Organisasi - [Forum Review] Forum Strategis Gerakan Perempuan Menyebarkan Kesetaraan Gender dan Demokrasi - Eksplorasi, Aksi, Perubahan. Retrieved January 8, 2022, from <http://women21.or.kr/educate/14748>
- KWAU. (2019d, November 12). Notice - [Politics Talk] Pemilihan Umum 2020, Political Talk Seri 1 untuk memperluas partisipasi politik perempuan - "Mengubah politik dengan jumlah dan alokasi yang sama!" Retrieved January 7, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=7&document\\_srl=15187](http://women21.or.kr/index.php?mid=notice&page=7&document_srl=15187)
- KWAU. (2020a, March 27). Politik - [Pemilu 21] Presentasi hasil analisis komparatif ikrar kekerasan gender di 4 partai politik (Partai Demokrat, Partai Persatuan, Partai Keadilan, Partai Rakyat) pada Pemilu ke-21. Retrieved January 8, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=3&document\\_srl=16194&ckattempt=1](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=3&document_srl=16194&ckattempt=1)
- KWAU. (2020b, April 1). Politik - [pemilihan umum ke-21] "Politik feminis sekarang!" Calon daerah pemilihan umum ke-21 melihat statistik. Retrieved January 8, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=2&document\\_srl=16291](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=2&document_srl=16291)
- KWAU. (2020c, April 8). Politik - [Jaringan Pemilihan Umum 2020] Konferensi pers untuk mengevaluasi janji-janji partai dalam pemilihan umum ke-21 (Rabu, 4/8 11 pagi). Retrieved January 8, 2022, from [http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=2&document\\_srl=16408](http://women21.or.kr/index.php?mid=politics&page=2&document_srl=16408)
- KWAU. (2021). Major Actions and Achievements. Retrieved March 13, 2021, from <http://women21.or.kr/major>
- Lee, A.-R., & Lee, H.-C. (2013). The Women's Movement in South Korea Revisited. *Asian Affairs: An American Review*, 40(2), 43–66. <https://doi.org/10.1080/00927678.2013.788412>
- Moon, S. (2002). Carving Out Space: Civil Society and the Women's Movement in South Korea. *The Journal of Asian Studies*, 61(2), 473–500. <https://doi.org/10.2307/2700298>
- Nations, U. (2021). Gender equality and women's empowerment – United Nations Sustainable Development. Retrieved March 13, 2021, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- Oh, K. J. (2016). Women's political participation in South Korea and activist organizations. *Asian Journal of Women's Studies*, 22(3), 338–345. <https://doi.org/10.1080/12259276.2016.1205382>
- Park, B. J. (2001). Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power. *Korea Journal*, 41(4), 48–73. Retrieved from [https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs\\_GeneralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK6BooJinParkPatriarchyInKoreanSociety.pdf](https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_GeneralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK6BooJinParkPatriarchyInKoreanSociety.pdf)
- Park, I. H. A. N., & Cho, L.-J. A. Y. (2015). Confucianism and the Korean Family. *Journal of Comparative Family Studies*, 26(1), 117–134. Retrieved from



- <https://www.jstor.org/stable/41602370>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Arita L, Ed.). <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Sawarjuwono, T. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)*, 5(1), 35–57. <https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp.35-57>
- Setiawan, A. (2018). Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3925>
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan. In *Nilacakra*.
- Syafputri, E. (2017). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Global South Review*, 1(2), 165. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>
- UN Women. (2020). Country Fact Sheet | UN Women Data Hub. Retrieved November 19, 2021, from <https://data.unwomen.org/country/republic-of-korea>
- UNDP. (2020). | Human Development Reports. Retrieved January 3, 2022, from <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KOR>
- Weforum. (2018). Global Gender Gap Report 2018 - Reports - World Economic Forum. Retrieved March 13, 2021, from <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=KOR>
- Weforum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. In *World Economic Forum*.
- Yi, P. (2008). *Women in Korean History* (T. Chan, Ed.). Seoul: Ewha Womans University Press.